

Membangun kesadaran kolektif melalui sosialisasi Perubahan ppks menjadi PPKPT di STIE Jakarta

Oktavia Marpaung¹, Sita Dewi^{2*}, Bertha Elvy Napitupulu³, Frisca L. Siagian⁴

^{1,2,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta

³ FISH Universitas Audi Indonesia

oktavia_marpaung@stie.jayakarta.ac.id, sitadewi.27@gmail.com,
bertha.napitupulu27@gmail.com, friscalgs@gmail.com

***Korespondensi :** sitadewi.27@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan kebijakan nasional dari PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) menjadi PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) menandai tonggak penting dalam upaya menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKPT STIE Jakarta merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat kampus. Artikel ini bertujuan mendokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut serta mengulas makna strategisnya dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan. Pendekatan naratif digunakan untuk menyampaikan dinamika kegiatan dan dampaknya terhadap kesadaran kolektif civitas akademika. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan serta mekanisme pelaporan dan penanganannya.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam mendorong pelaksanaan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 secara optimal.

Kata kunci: PPKPT, kekerasan kampus, kesetaraan, sosialisasi, pengabdian masyarakat

ABSTRACT

The change in national policy from PPKS (Prevention and Handling of Sexual Violence) to PPKPT (Prevention and Handling of Violence in Higher Education) marks an important milestone in efforts to create a safe, inclusive campus free from all forms of violence. The outreach activities conducted by the STIE Jakarta PPKPT Task Force represent a tangible form of service to the campus community. This article aims to document the implementation process of these outreach activities and discuss their strategic significance in fostering a campus culture free from violence. A narrative approach is used to convey the dynamics of the activities and their impact on the collective awareness of the academic community. The results of these activities demonstrate an increased understanding of the types of violence as well as the mechanisms for reporting and addressing them.

It is hoped that these activities can serve as a model of best practice in promoting the optimal implementation of Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 55 of 2024.

Keywords: PPKPT, campus violence, equality, outreach, community service

PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, telah menjadi isu yang kian mendesak untuk ditangani secara sistemik. Data dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA) pada April 2024 menyebutkan bahwa telah terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Angka ini belum mencerminkan kasus kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya seperti perundungan (*bullying*), diskriminasi, hingga kekerasan berbasis kebijakan institusi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ruang akademik belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi seluruh warga kampus.

Hal ini mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan intervensi melalui perubahan regulasi. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS yang sebelumnya hanya mencakup kekerasan seksual, diperbarui menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang PPKPT. Regulasi terbaru ini memberikan mandat yang lebih komprehensif kepada perguruan tinggi untuk tidak hanya mencegah dan menangani kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan dalam bentuk lain: fisik, psikis, diskriminasi dan intoleransi, bullying, serta kebijakan yang mengandung unsur kekerasan (Kemendikbudristek, 2024).

Dari perspektif teori organisasi, perubahan kebijakan tidak otomatis mengubah perilaku organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari pengendalian sosial (Schein, 2010; Vasumathi et al., 2025), nilai, norma, dan asumsi dasar yang diinternalisasi Bersama yang memengaruhi perilaku, pemikiran, keyakinan, dan sikap. Oleh karena itu, transformasi dari PPKS menjadi PPKPT memerlukan proses internalisasi nilai anti-kekerasan sebagai bagian dari budaya kampus (Guo, 2024; White et al., 2024). Dalam konteks perguruan tinggi, sosialisasi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kesadaran kolektif terhadap nilai kesetaraan dan non-kekerasan.

Sebagai bagian dari tanggungjawab institusional, STIE Jayakarta membentuk Satgas PPKPT yang sebelumnya merupakan Satgas PPKS. Untuk mengomunikasikan perubahan ini kepada seluruh warga kampus, Satgas PPKPT menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) semester genap tahun akademik 2024/2025. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi PPKPT di STIE Jayakarta tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari proses perubahan institusional dan penguatan budaya kampus yang aman.

KERANGKA TEORITIS

Kekerasan dalam Perspektif Ekologi Sosial

WHO (2014) dan Heise (1998) mengembangkan model ekologi kekerasan yang menjelaskan bahwa kekerasan dipengaruhi oleh faktor individual, relasional, institusional, dan struktural. Dalam konteks kampus, kekerasan tidak hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan norma sosial yang permisif.

Budaya Organisasi dan Perubahan Institusional

Perubahan kebijakan memerlukan kesiapan institusional (*organizational readiness for change*). Kesiapan organisasi mencakup komitmen bersama dan kapasitas kolektif untuk melaksanakan perubahan. Tanpa kesiapan struktural, kebijakan cenderung berhenti pada tataran formalitas (Weiner, 2009).

METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara luring (tatapmuka) pada hari Sabtu, 26 April 2025 bertempat di Aula 1 STIE dan STMIK Jayakarta. Dimulai pukul 13.00 dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Peserta yang hadir sebanyak 66 orang dengan 12 orang dosen dan 54 orang mahasiswa. Bentuk kegiatan dilakukan berupa sosialisasi yang dirancang dalam format seminar edukatif yang terdiri dari: Sambutan oleh Ketua STIE Jayakarta kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tiga narasumber dan diskusi tanya-jawab interaktif serta pembagian sertifikat dan doorprize bagi peserta aktif.

Pemilihan bentuk sosialisasi ini bertujuan menciptakan ruang belajar partisipatif dan dialogis. Kegiatan dipandu oleh moderator dari Satgas PPKPT, dan disiapkan secara kolaboratif antara Satgas, dosen, dan BEM STIE Jayakarta.

JALANNYA KEGIATAN DAN HASIL

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", diikuti doa pembuka. Ketua STIE Jayakarta, Revan Andhityara, SE., MM., CIERM, memberikan sambutan sekaligus menekankan komitmen lembaga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Narasumber 1: Riyanto Wurjarso

Selaku Wakil Ketua III STIE Jayakarta, beliau memaparkan pentingnya sosialisasi ini dalam konteks aktualisasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. PPKPT diposisikan sebagai garda terdepan pencegahan kekerasan di kampus. Ia mengajak peserta untuk aktif menjadi agen perubahan dalam membangun budaya kampus tanpa kekerasan. Inti materi adalah "STOP KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN bukan hanya jargon. Ini komitmen moral kita bersama," tegasnya.

Narasumber 2: Dra. Sita Dewi, M.Si

Sebagai Ketua Satgas PPKPT, beliau menjelaskan bahwa perubahandari PPKS ke PPKPT tidak sekadar perubahan istilah, namun mencakup perluasan mandat dan tanggungjawab. Enam jenis kekerasan kini menjadi perhatian utama Satgas PPKPT: kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi dan intoleransi, bullying, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

Selain itu, mekanis pelaporan diatur secara ketat. Prosedur penanganan kasus dimulai dari pelaporan, pemanggilan pihak-pihak terkait (korban, pelaku, saksi), hingga rekomendasi sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi.

Narasumber 3: Bertha Elvy Napitupulu

Sebagai Wakil Ketua Satgas PPKPT, beliau memaparkan strategi penguatan system pencegahan. Di antaranya adalah edukasi berkelanjutan tentang kekerasan dan kesetaraan gender, pelatihan bagi anggota Satgas, serta advokasi pembentukan unit layanan psikologis. Ia juga menekankan pentingnya membangun empati dan solidaritas sosial dalam kampus. "Kita semua bertanggungjawab untuk tidak menjadi pelaku, tidak menjadi korban, dan tidak diam," ujarnya.

Diskusi dan Interaksi Peserta

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Pertanyaan yang muncul mencerminkan ketertarikan dan keingintahuan peserta terhadap isu kekerasan kampus. Misalnya:

1. Apakah tekanan dari orang tua agar cepat lulus bias dikategorikan sebagai kekerasan psikis?
2. Bagaimana mekanisme sanksi terhadap pelaku kekerasan?
3. Apakah tindakan candaan fisik, seperti menyentuh bagian tubuh, termasuk kekerasan?
4. Apakah Satgas PPKPT memiliki dukungan psikolog profesional?

Satgas menanggapi secara komprehensif. Tekanan orang tua dapat menjadi kekerasan jika menyebabkan gangguan psikis serius. Candaan fisik atau verbal bias menjadi kekerasan jika tidak diinginkan atau menyebabkan rasa tidak nyaman. Namun, Satgas mengakui keterbatasan, terutama ketiadaan tenaga professional psikolog dan keterbatasan dana untuk rujukan pemulihan.

Tantangan dan Refleksi Kritis

Kegiatan ini membuka ruang untuk merefleksikan tantangan yang dihadapi Satgas PPKPT, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman civitas akademika tentang bentuk-bentuk kekerasan yang non-fisik
2. Minimnya dukungan structural seperti layanan psikologis, hukum, dan dana operasional
3. Kurangnya publikasi dan internalisasi nilai-nilai anti kekerasan dalam kegiatan akademik

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi internal. Satgas mendapat masukan langsung dari peserta mengenai cara-cara pendekatan yang lebih komunikatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

FOTO KEGIATAN

Berikut ini adalah beberapa foto kegiatan ”Sosialisasi Perubahan PPKS Menjadi PPKPT”:



Ketiga Narasumber yang menjadi pemateri: Riyanto Wujarso Sita Dewi Bertha Elvy Napitupulu,



Kenang-kenangan untuk peserta yang aktif mengajukan pertanyaan



Seluruh peserta, narasumber, panitia,
“STOP KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN”



Satgas PPKPT STIE Jayakarta bersama dosen, BEM STIE Jayakarta dan panitia

DAMPAK DAN LUARAN KEGIATAN

Setelah kegiatan ini, terjadi peningkatan kesadaran peserta tentang isu kekerasan. Hal ini terlihat dari refleksi peserta di akhir kegiatan dan evaluasi informal panitia. Sertifikat

partisipasi diberikan kepada seluruh peserta dan narasumber, serta door prize untuk penanya aktif. Sebagai luaran tambahan, laporan kegiatan akan dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat sebagai bentuk diseminasi praktik baik.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap spektrum kekerasan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Peningkatan ini tercermin dari kualitas pertanyaan yang diajukan peserta, kemampuan mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan psikis dan diskriminasi, serta munculnya refleksi kritis mengenai praktik interaksi sehari-hari yang sebelumnya dianggap wajar. Secara konseptual, perubahan ini menunjukkan proses internalisasi norma baru dalam komunitas akademik, di mana nilai anti-kekerasan mulai dipahami sebagai standar bersama. Sosialisasi berperan membentuk norma subjektif bahwa kekerasan bukan lagi persoalan individual, melainkan tanggungjawab kolektif kampus. Meskipun evaluasi yang dilakukan masih bersifat kualitatif dan observasional, indikator partisipasi aktif dan diskusi reflektif menunjukkan adanya pergeseran sikap awal menuju kesadaran preventif.

Dari sisi luaran, kegiatan ini menghasilkan beberapa output konkret dan strategis. Secara langsung, peserta memperoleh sertifikat partisipasi sebagai bentuk pengakuan atas keterlibatan aktif dalam agenda transformasi budaya kampus. Pemberian door prize bagi penanya aktif turut mendorong partisipasi dialogis, yang dalam konteks pembelajaran sosial berfungsi sebagai reinforcement positif terhadap perilaku partisipatif. Secara kelembagaan, laporan kegiatan disusun untuk dipublikasikan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk diseminasi praktik baik serta akuntabilitas akademik. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai kontribusi institusional dalam membangun model sosialisasi kebijakan berbasis budaya organisasi yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan sesaat, melainkan menjadi bagian dari proses perubahan institusional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perubahan kebijakan dari PPKS menjadi PPKPT merupakan langkah maju dalam perlindungan hak-hak warga kampus dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Namun, perubahan ini harus dibarengi dengan sosialisasi yang terus-menerus, edukasi yang inklusif, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Transformasi regulasi hanya akan efektif apabila diikuti dengan internalisasi nilai, penguatan kapasitas institusi, dan komitmen berkelanjutan seluruh warga kampus.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satgas PPKPT STIE Jayakarta ini menjadi contoh konkret bagaimana pengabdian kepada masyarakat bisa diintegrasikan dengan transformasi kebijakan. Melalui kegiatan ini, kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. “Civitas Akademika STIE Jayakarta Menolak Kekerasan” bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kolektif menuju transformasi budaya kampus yang humanis dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

-
- [1] **Guo, Y.** (2024). Influence of Collective Consciousness on Individuals' Continuous Use Willingness of Digital Government Websites: A Psychological Perspective. *Digital Government: Research and Practice*, 5(2). <https://doi.org/10.1145/3664820>
- [2] **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.** (2021). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- [3] **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.** (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
- [4] **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.** (2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024.
- [5] **Nurtjahyo, Lidwina Inge.** (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6] **Satgas PPKPT STIE Jayakarta.** (2025). Laporan Kegiatan Sosialisasi Perubahan PPKS Menjadi PPKPT.
- [7] **Schein, E. H.** (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass. www.josseybass.com
- [8] **Vasumathi, A., Vasudevan, A., Razak, A., & Mohammad, S. I. S.** (2025). An empirical study on the impact of organizational culture dimensions on employees' performance through organizational support in the IT industry. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102054>
- [9] **Weiner, B. J.** (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>
- [10] **White, K., Wang, W., & Aquino, K.** (2024). Collective consciousness and consumer behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 34(4), 687–693. <https://doi.org/10.1002/jcpy.1433>
- [11] **WHO.** (2014). *Global status report on violence prevention 2014*. World Health Organization.